

Identifikasi Jenis Pajak Dan Retribusi Daerah Serta Potensinya Di Kabupaten Sorong

Slamet¹, Amiruddin², Arie Purnomo³

Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi dan pertumbuhan setiap jenis pajak daerah terhadap total penerimaan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah; untuk mengetahui identifikasi jenis pajak daerah dan retribusi daerah; dan untuk mengetahui proyeksi pajak daerah dan retribusi daerah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan Teknik pengumpulan data yakni wawancara dan dokumentasi. Populasi pada penelitian ini ialah dinas pendapatan provinsi Papua Barat dengan sampel dinas pendapatan daerah Kabupaten Sorong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah Kabupaten Sorong terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lain-lain, rata-rata pertumbuhan dalam sepuluh tahun periode pengamatan pertumbuhan terkecil terdapat pada retribusi daerah sebesar 34,6% kemudian pajak daerah sebesar 50,6% sedangkan penerimaan lain-lain 14,8%; Identifikasi setiap jenis pajak daerah berupa pajak prima, pajak berkembang, pajak terbelakang, dan pajak potensial. Identifikasi setiap jenis retribusi berupa retribusi prima, retribusi potensial, retribusi berkembang, retribusi terbelakang, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi dispensasi jalan, retribusi lapor tenaga kerja, dan retribusi perikanan. proyeksi pajak daerah menggunakan persamaan eksponensial; $\ln Y = 19,80992 + 0,189813 X$, sedangkan persamaan proyeksi retribusi daerah menggunakan persamaan eksponensial; $\ln Y = 19,64295 + 0,081971 X$. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan tingkat pertumbuhan dan kontribusi jenis pajak daerah dan retribusi terhadap total penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah selalu mengalami fluktuasi; beberapa jenis pajak dan retribusi tidak teridentifikasi dikarenakan tidak dimiliki dan baru berjalan; adapun proyeksi pajak daerah mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sedangkan retribusi daerah mengalami penurunan pada tahun 2012 dan meningkat pada tahun 2013.

Kata Kunci : Jenis Pajak, Retiribusi, Kabupaten Sorong

PENDAHULUAN

Berlakunya produk hukum mengenai pemerintah daerah membawa angin segar dalam pelaksanaan desentralisasi. Konsekuensinya pemerintah daerah harus dapat mengatur dan mengurus rumahtangganya sendiri. Pelaksanaan tugas tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan karena salah satunya perlu kemampuan ekonomi yaitu; pertama adalah tentang bagaimana pemerintah daerah dapat menghasilkan finansial untuk menjalankan organisasi termasuk memberdayakan masyarakat, kedua bagaimana pemerintah daerah melihat fungsinya mengembangkan kemampuan ekonomi daerah (Nugroho, 2000:109).

Ciri utama kemampuan suatu daerah adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri. Menurut Kaho (1997:124) untuk menjalankan fungsi pemerintahan faktor keuangan suatu hal yang sangat penting karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya. Pemerintah daerah tidak saja menggali sumber-sumber keuangan akan tetapi juga sanggup mengelola dan menggunakan secara *value for money* dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga ketergantungan kepada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin dapat ditekan. Dengan dikurangnya ketergantungan kepada pemerintah pusat maka PAD menjadi sumber keuangan terbesar. Kegiatan ini hendaknya didukung juga oleh kebijakan perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah sebagai prasyarat dalam sistem pemerintahan negara (Koswara, 2000:50)

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, menyebutkan bahwa sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah adalah dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri yang terdiri dari ; (1) hasil pajak daerah; (2) hasil retribusi daerah; (3) hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; (4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, diharapkan dapat menjadi menyangga dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah. Dengan semakin banyak kebutuhan daerah dapat dibiayai oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin tinggi pula tingkat kualitas otonomi daerah, juga semakin mandiri dalam bidang keuangan daerahnya (Syamsi, 1987:213).

Proses menuju kemandirian tersebut, terutama dari segi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masih dirasakan kurang. Hal ini tercermin dari peranan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD yang dirasakan masih rendah, khususnya untuk pendapatan asli daerah kabupaten/kota. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hirawan, bahwa selama ini Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan masih merupakan bagian yang relatif kecil dan bahkan hanya sekitar 4 persen dari keseluruhan penerimaan negara (Insukindro, dkk, 1994:2)

Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mempunyai peranan penting terhadap kontribusi penerimaan adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah daerah hendaknya mempunyai pengetahuan dan dapat mengidentifikasi tentang sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensial terutama dari pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan tidak memperhatikan dan mengelola pajak daerah dan retribusi daerah yang potensial maka pengelolaan tidak akan efektif, efisien dan ekonomis. Pada akhirnya akan merugikan masyarakat dan pemerintah daerah sebagai pemungut karena pajak dan retribusi tidak mengenai sasaran dan realisasi terhadap penerimaan daerah tidak optimal. Demikian pula halnya dengan Pemerintah Kabupaten Sorong yang telah berupaya terus menerus meningkatkan pendapatan asli daerahnya dengan berbagai cara seperti memperluas cakupan pungutan pajak dan retribusi kabupaten, efisiensi biaya pemungutan dan penyempurnaan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan data, informasi dan keterangan di atas dapat dikatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Sorong belum dikelola dengan baik potensi yang sebenarnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Mardiasmo dkk (2000:I.3-4) yang menyatakan bahwa di sisi penerimaan, kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerahnya secara berkesinambungan masih lemah. Bahkan masalah yang sering muncul adalah rendahnya kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan prediksi penerimaan daerah yang akurat, sehingga belum dapat dipungut secara optimal.

Sehubungan kurang diperhatikannya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang potensial maka realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah belum optimal sehingga penyelenggaraan otonomi daerah belum mendapat dukungan yang optimal juga dari sumber keuangan daerah. Pada akhirnya terjadi kecenderungan membuat peraturan daerah yang baru tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang belum pernah ada sehingga memberatkan masyarakat, padahal pajak daerah dan retribusi daerah yang baru tersebut tidak potensial.

Dari uraian di atas diperoleh suatu gambaran bahwa potensi pajak daerah dan retribusi daerah bagi Pemerintah Kabupaten Sorong belum diketahui, terutama jenis pajak daerah dan retribusi daerah apa saja yang menjadi pendapatan yang potensial bagi Pendapatan Asli Daerah. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang potensial apabila diketahui dan

ditingkatkan pengelolaan sesuai dengan potensinya akan memberikan tambahan Pendapatan Asli Daerah, akan tetapi sebaliknya apabila tidak diketahui potensinya akan membuat kerugian karena potensinya tidak dimanfaatkan secara maksimal.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang meneliti dan menjelaskan peranan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sorong. Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap obyek penelitian pada suatu saat tertentu. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu variabel atau tema, gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala (fenomena) menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan (Widodo & Mukhtar, 2000: 15).

Data kuantitatif yang berasal dari data sekunder digunakan untuk mendukung analisis penelitian secara keseluruhan sebagai pembuktian bagi simpulan fenomena antara variabel bebas dan variabel terganggunya, yang dalam hal ini merupakan analisis efektivitas organisasi Dispenda Kabupaten Sorong dan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas organisasi dalam mengemban tugas pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Jenis dan Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri atas data primer, dan data sekunder. Data primer adalah pengambilan data yang dilakukan dengan wawancara langsung dengan responden. Selain melakukan wawancara langsung, juga melakukan pengisian angket yang telah dipersiapkan.

Data sekunder adalah keseluruhan data yang bersumber dari literatur dan referensi, undang-undang, peraturan-peraturan atau keputusan yang berkaitan dengan penelitian dan dokumen-dokumen yang diperoleh.

Populasi dan Sampel

Menurut Sugiono (2010), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subjek yang diterapkan untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini ialah dinas pendapatan provinsi Papua Barat. Menurut Sugiono (2010) menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu,

kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif. sampel pada penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sorong.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung untuk memperoleh informasi dalam menghimpun informasi yang relevan dengan kajian; dan dokumentasi, yaitu aktivitas untuk memperoleh sejumlah data melalui pencatatan-pencatatan dari dokumen-dokumen yang terdapat pada lokasi penelitian.

Teknik Analisis Data

Prosedur pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan klasifikasi jenis dan sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Pengolahan data primer dilakukan dengan data-data yang bersumber dari hasil wawancara (catatan hasil interview) yang telah ditranskripsikan, selanjutnya dilakukan pengkodean untuk mengidentifikasi tema atau klasifikasi yang nantinya akan mengarahkan penelitian pada temuan atau bahkan pengumpulan data tambahan, serta data-data pendukung lainnya.

Pengolahan data sekunder melalui analisis teoritis atau kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, laporan-laporan, jurnal atau tulisan ilmiah dan hasil observasi di lapangan serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian. Prosedur pengolahan data tersebut dilakukan dalam 3 tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Yang dimaksud dengan reduksi data adalah suatu proses untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, menyederhanakan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikannya. Sedangkan penyajian data adalah proses penyusunan dan penyajian informasi yang diperoleh sebagai dasar pengambilan keputusan, selanjutnya menarik kesimpulan atas hasil penelitian yang telah diperoleh. Adapun data yang diperoleh melalui analisis deskripsi ini dilakukan dengan cara-cara penyajian dalam bentuk tabel dan gambar sesuai dengan keberadaan data yang sesungguhnya dan tidak menggunakan uji statistik.

Sesuai dengan tujuan penelitian ini bersifat deskriptif dan metode yang digunakan adalah kualitatif artinya menyajikan data secara naratif yang didukung oleh data kuantitatif sesuai dengan hasil perhitungan pada tabel dan analisis persentase. Analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan deskriptif yaitu menganalisis data dengan mendeskripsikan dan menggambar data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa membuat suatu kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi (Sugiono, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontribusi Dan Pertumbuhan Setiap Jenis Pajak Daerah Terhadap Total Penerimaan Pajak Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sorong terdiri dari tiga jenis yaitu ; pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lain-lain. Pertumbuhan setiap jenis pendapatan asli daerah Kabupaten Sorong mengalami fluktuasi. Rata-rata pertumbuhan dalam sepuluh tahun periode pengamatan pertumbuhan terkecil terdapat pada retribusi daerah sebesar 34,6% kemudian disusul oleh pajak daerah sebesar 50,6% sedangkan penerimaan lain-lain pertumbuhannya sangat pesat sekali yaitu sebesar 5938,2%.

Rendahnya pertumbuhan pada jenis retribusi daerah ini dari pendapatan asli daerah lainnya disebabkan besarnya pengaruh nilai realisasi dari tahun anggaran 2007/2008 sampai dengan tahun anggaran 2011/2012 yang mengalami penurunan setiap tahunnya. Penurunan ini juga disebabkan penghapusan beberapa jenis retribusi daerah dimana nilai realisasinya rendah sekali. Penurunan nilai realisasi ini pada akhirnya memberikan penurunan kontribusi terhadap total pendapatan dari jenis retribusi daerah.

Pajak daerah mengalami peningkatan pertumbuhan yang stabil setiap tahunnya, sedangkan untuk jenis penerimaan lain-lain terjadi pertumbuhan yang luar biasa pada tahun anggaran 2010/2011 dan 2014. Pertumbuhan penerimaan lain-lain pada tahun anggaran 2010/2011 disebabkan adanya pendapatan dari jasa giro. Peningkatan pendapatan jasa giro meningkat sehubungan peningkatan simpanan uang pada kas daerah yang diterima dari bantuan pihak ketiga yaitu dari 2 perusahaan besar di Kabupaten Sorong PT Pertamina. Untuk tahun 2014 peningkatan pertumbuhan penerimaan lain-lain juga disebabkan oleh pendapatan dari jasa giro. Peningkatan pendapatan jasa giro pada tahun 2014 berkenaan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah membawa dampak terhadap peningkatan APBD Kabupaten Sorong. Peningkatan APBD yang berasal dari pemerintah pusat seperti DAU, bagi hasil minyak bumi dan bagi hasil pajak. Pada akhirnya membawa peningkatan terhadap kas daerah sehingga jasa giro menjadi meningkat.

Kontribusi terbesar terhadap pendapatan asli daerah dalam periode sepuluh tahun pengamatan diberikan oleh pajak daerah dengan rata-rata sebesar 52,3%, retribusi daerah rata-rata sebesar 45,9% dan penerimaan lain-lain rata-rata sebesar 1,8%.

Pajak daerah mengalami peningkatan kontribusi yang stabil selama tujuh tahun pertama pengamatan selanjutnya mengalami fluktuasi, sedangkan retribusi daerah sebaliknya. Pada awal tahun pengamatan retribusi daerah memberikan kontribusi yang terbesar pada pendapatan asli daerah di Kabupaten Sorong akan tetapi tahun berikutnya selalu mengalami

penurunan. Penurunan disebabkan turunnya nilai realisasi dari pendapatan retribusi daerah dan juga dipengaruhi oleh meningkatnya pendapatan dari pajak daerah. Dengan meningkatnya realisasi pendapatan pajak daerah dan menurunnya realisasi pendapatan retribusi daerah secara langsung akan mengurangi tingkat kontribusi retribusi daerah. Pembahasan ini akan terlihat lebih jelas pada saat menganalisa subbab pertumbuhan dan kontribusi jenis retribusi daerah dalam bab analisis penelitian ini. Jenis pendapatan asli daerah dari penerimaan lain-lain sangat kecil sekali memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sorong, karena penerimaan lain-lain sampai saat ini hanya mengandalkan penerimaan dari jasa giro. Padahal jasa giro juga bergantung terhadap besarnya jumlah kas daerah yang disimpan pada Bank Pembangunan Daerah Kabupaten Sorong.

Pertumbuhan dan kontribusi jenis pajak daerah

Pemerintah Kabupaten Sorong mempunyai enam jenis pajak daerah yaitu; pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak galian golongan C serta pajak pemanfaatan air bawah tanah. Pertumbuhan pajak daerah di Kabupaten Sorong akan dipengaruhi oleh setiap jenis pajak tersebut.

Pertumbuhan setiap jenis pajak daerah Kabupaten Sorong mengalami pertumbuhan yang sangat variatif. Pertumbuhan setiap pajak daerah dari lima tahun pengamatan periode tahun 2010/2011 sampai dengan 2015 dengan nilai rata-rata mulai dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil adalah; pajak pemanfaatan air bawah tanah, pajak penerangan jalan, pajak hotel dan restoran, pajak reklame, pajak galian golongan C dan pajak hiburan.

Pajak pemanfaatan air bawah tanah mengalami pertumbuhan yang sangat luar biasa pada tahun anggaran 2013/2014 dan 2015. Pertumbuhan ini disebabkan peningkatan penggunaan air bawah tanah yang dilakukan oleh PT. Pertamina dalam operasinya mengelola minyak mentah (Kilang Minyak) dan beroperasinya 2 perusahaan getah (karet) yang terletak di Distrik Salawati. Pertumbuhan pajak penerangan jalan meningkat disebabkan meningkatnya pengguna jasa listrik yang dikelola PT PLN maupun tidak dikelola PLN (kelurahan yang belum masuk listrik). Kontribusi terbesar terletak pada meningkatnya jumlah pelanggan PLN di Kabupaten Sorong. Tersambungannya jaringan listrik tersebut menyebabkan daya tegangan listrik di Kabupaten Sorong meningkat pula, sehingga permintaan penambahan daya dan pemasangan baru dari rumah tangga dan perusahaan dapat terlayani. Konsekuensinya pendapatan dari pajak penerangan jalan bertambah seiring dengan meningkatnya pengguna jasa listrik.

Pajak hiburan adalah satu-satunya pajak yang mengalami penurunan di Kabupaten Sorong. Penurunan ini terlihat pada tahun anggaran 2012/2013. Penurunan ini disebabkan banyaknya tempat-tempat hiburan di Kabupaten Sorong tutup. Tempat-tempat hiburan ini banyak dimiliki oleh pengusaha dari luar Kabupaten Sorong. Penutupan dilakukan oleh pemilik sendiri disebabkan faktor keamanan dengan tidak menentunya keamanan Indonesia pada saat itu sehingga membawa imbas ke Kabupaten Sorong.

Kontribusi setiap jenis pajak daerah akan membawa pengaruh terhadap total pendapatan pajak daerah, yang pada akhirnya akan membawa pengaruh kepada total pendapatan asli daerah. Kontribusi rata-rata setiap jenis pajak daerah pada tahun pengamatan periode dari tahun 2010/2011 sampai dengan 2015 mulai dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil adalah; pajak penerangan jalan, pajak hotel dan restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak galian golongan C dan pajak pemanfaatan air bawah tanah.

Kontribusi terbesar diberikan pajak penerangan jalan disebabkan besarnya nilai realisasi dibandingkan pajak-pajak daerah lainnya. Kontribusi terbesar terlihat pada tahun anggaran 2014 dan 2015. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa besarnya kontribusi tersebut dipengaruhi nilai realisasi. Realisasi terbesar terlihat dengan meningkatnya pengguna jasa listrik terutama pada tahun 2014 dan 2015 di Kabupaten Sorong. Kontribusi terbesar pada pajak hotel dan restoran yaitu pada tahun anggaran 2011/2012 dan 2013/2014. Besarnya kontribusi tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya wisatawan.

Kontribusi terendah adalah pajak galian golongan C dan pajak pemanfaatan air bawah tanah. Rendahnya kontribusi pajak galian golongan C di Kabupaten Sorong lebih banyak disebabkan jarang ditemui jenis galian golongan C karena keadaan alam Kabupaten Sorong yang berawa. Hal inilah yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap pendapatan pajak pemanfaatan air bawah tanah karena air di Kabupaten Sorong payau dan berminyak. Keadaan seperti akan menyulitkan pemanfaatan air bawah tanah sehingga pendapatan dari jenis pajak galian golongan C dan pajak pemanfaatan air bawah tanah realisasinya rendah di Kabupaten Sorong.

Berdasarkan uraian di atas maka kontribusi jenis pajak daerah akan berpengaruh kontribusinya terhadap total pendapatan asli daerah. Selanjutnya untuk melihat seberapa besar kontribusi setiap jenis pajak daerah terhadap total pendapatan asli daerah di Kabupaten Sorong.

Bahwa ada 2 jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi terbesar terhadap total pendapatan asli daerah yaitu untuk pajak penerangan jalan dan pajak hotel dan restoran. Jenis pajak daerah di Kabupaten Sorong berdasarkan rata-rata pada tahun pengamatan periode

tahun anggaran 2010/2011 sampai dengan 2015 yang memberikan kontribusi dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil terhadap total pendapatan asli daerah Kabupaten Sorong adalah; pajak penerangan jalan, pajak hotel dan restoran, pajak reklame, pajak galian golongan C, pajak pemanfaatan air bawah tanah dan pajak hiburan.

Pertumbuhan dan kontribusi jenis retribusi daerah

Pertumbuhan retribusi daerah di Kabupaten Sorong paling rendah dibandingkan dengan jenis pendapatan asli daerah lainnya. Rendahnya pertumbuhan retribusi daerah Kabupaten Sorong tersebut sangat dipengaruhi pertumbuhan setiap jenis retribusi daerah. Untuk mengamati seberapa besar pertumbuhan setiap jenis retribusi daerah di Kabupaten Sorong.

Bahwa 2 retribusi daerah di Kabupaten Sorong terjadi penurunan, 9 mengalami peningkatan pertumbuhan dan 4 diantaranya belum mengalami pertumbuhan. Hal ini akan mempengaruhi pertumbuhan retribusi daerah secara keseluruhan. Dilihat pada tahun pengamatan periode 2010/2011 sampai dengan 2015 jenis retribusi yang rata-rata mengalami penurunan adalah; retribusi pasar dan retribusi kekayaan daerah, serta yang mengalami peningkatan adalah; retribusi potong hewan, retribusi parkir, retribusi trayek, retribusi izin bangunan, retribusi izin gangguan, retribusi pelayanan kesehatan, retribusi terminal, retribusi cetak KTP dan KK dan retribusi sampah. Retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi dispensasi jalan, retribusi lapor tenaga kerja dan retribusi hasil perikanan belum dapat dihitung pertumbuhannya karena baru memberikan kontribusi pada tahun anggaran 2015.

Penurunan yang terjadi pada retribusi kekayaan daerah lebih banyak dipengaruhi oleh manajemen Pemerintah Kabupaten Sorong dalam mengelola kekayaan daerah. Banyak kekayaan daerah yang tidak terurus oleh Pemerintah Kabupaten Sorong sehingga potensinya tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Kekayaan daerah sebagian telah dilakukan pelelangan karena dianggap tidak efektif dan efisien lagi untuk ditarik pungutan retribusinya. Puncaknya pada tahun anggaran 2014 dan 2015 tidak ada sama sekali pendapatan dari retribusi kekayaan daerah. Retribusi pasar mengalami penurunan terbesar pada tahun anggaran 2013/2014 disebabkan berkurangnya pungutan. Kurangnya pungutan terhadap retribusi pasar tersebut merupakan imbas dari dibongkarnya pasar terbesar di Kabupaten Sorong (Pasar Aimas). Pembongkaran ini dilakukan untuk dibangunnya pasar yang lebih baik. Pedagang yang berada di Pasar Aimas tersebut disediakan lokasi penampungan sementara, akan tetapi di penampungan tersebut terjadi masalah karena banyak pedagang yang tidak dapat tempat. Permasalahan ini berakibat terhadap realisasi pungutan retribusi karena para pedagang tidak mau membayar retribusi sampai dengan permasalahan ini selesai.

Pertumbuhan retribusi potong hewan sangat luar biasa dibandingkan dengan retribusi lainnya pada tahun 2014. Pertumbuhan luar biasa tersebut disebabkan dibangunnya rumah potong hewan di Kabupaten Sorong pada tahun 1999. Selama ini hewan-hewan dipotong di luar Kabupaten Sorong (di Kota Sorong) sehingga tidak memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Sorong. Perkembangan kontribusi retribusi potong hewan masih kecil terhadap total pendapatan retribusi daerah. Realisasi pendapatan dari retribusi potong hewan masih sangat kecil. Pertumbuhan retribusi parkir lebih banyak disebabkan peningkatan jasa parkir di tepi jalan umum. Peningkatan luar biasa terlihat pada tahun 2015 dengan dirubahnya tata cara pemungutan parkir oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sorong. Pemungutan retribusi parkir dilakukan oleh pihak ketiga dengan penetapan target pada setiap ruas jalan yang potensial, sehingga Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sorong terima hasil pungutan dari pihak ketiga tersebut sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati. Pertumbuhan retribusi trayek sangat baik disebabkan Sele sebagai daerah pelabuhan. Sebagai daerah pelabuhan tentunya memiliki sarana transportasi yang akan menghubungkan daerah-daerah di luar Kabupaten Sorong untuk melayani penumpang yang akan melanjutkan perjalanan. Dengan meningkatnya sarana transportasi tersebut akan berpengaruh terhadap peningkatan realisasi pendapatan dari retribusi trayek.

Peningkatan pertumbuhan retribusi pelayanan kesehatan di Kabupaten Sorong meningkat luar biasa pada tahun anggaran 2013/2014. Peningkatan pertumbuhan tersebut dipengaruhi dengan berdirinya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sorong pada tahun 1999. Peningkatan ini juga dipengaruhi oleh penambahan prasarana kesehatan seperti puskesmas dan puskesmas pembantu dari 5 unit menjadi 12 unit.

Sejalan dengan konsep perpajakan bahwa retribusi daerah juga memberikan kontribusi terhadap total pendapatan asli daerah. Besarnya kontribusi retribusi daerah terhadap total pendapatan asli daerah dipengaruhi oleh kontribusi setiap jenis retribusi daerah. Oleh sebab itu untuk melihat seberapa besar kontribusi setiap jenis retribusi daerah terhadap total pendapatan retribusi daerah di Kabupaten Sorong.

Bahwa terjadi fluktuasi kontribusi setiap retribusi daerah terhadap total pendapatan retribusi daerah. Rata-rata kontribusi retribusi daerah mulai dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil pada periode tahun pengamatan 2010/2011 sampai dengan tahun 2015 adalah; retribusi izin bangunan, retribusi izin gangguan, retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan cetak KTP dan KK, retribusi sampah, retribusi pasar, retribusi trayek, retribusi parkir, retribusi terminal, retribusi potong hewan dan retribusi kekayaan daerah.

Kontribusi retribusi izin bangunan setiap tahunnya stabil. Besarnya kontribusi retribusi izin bangunan sejalan dengan perkembangan pembangunan di Kabupaten Sorong baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun perusahaan. Kontribusi izin gangguan juga stabil setiap tahunnya. Realisasi retribusi izin gangguan yang terbesar didapat dari pembayaran izin gangguan dari perusahaan yang berada di Kabupaten Sorong seperti PT Pertamina (pengoperasian kilang minyak puti tujuh) dan PT Bukit Kapur Reksa (pengolahan kelapa sawit menjadi minyak sawit). Peningkatan realisasi juga berasal dari perusahaan-perusahaan menengah seperti perusahaan getah(karet), perusahaan pemotongan kayu dan usaha pembuatan kapal berukuran sedang yang berada ditepi laut Sele. Untuk retribusi yang terkecil terdapat pada retribusi kekayaan daerah karena berada di bawah 1% kontribusinya. Kecilnya kontribusi ini seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa perhatian terhadap pengelolaan kekayaan daerah sangat kecil sekali.

Retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi dispensasi jalan, retribusi lapor tenaga kerja dan retribusi perikanan hanya memberikan kontribusi pada tahun anggaran 2015. Keempat retribusi tersebut mampu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap total pendapatan retribusi pada tahun anggaran 2015. Kontribusi yang diberikan pada tahun anggaran 2015 mulai dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil adalah; retribusi dispensasi jalan, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi perikanan dan retribusi lapor tenaga kerja.

Retribusi dispensasi jalan dan retribusi pengujian kendaraan bermotor realisasinya sangat besar sekali dibandingkan dengan retribusi lainnya padahal retribusi tersebut baru berjalan 1 tahun anggaran. Dulunya kedua retribusi ini berada di pemerintah daerah tingkat I. Besar retribusi dispensasi jalan tidak terlepas keberadaan perusahaan-perusahaan besar yang ada di Kabupaten Sorong. Perusahaan-perusahaan tersebut memberikan andil yang sangat besar terhadap pendapatan retribusi dispensasi jalan karena pengoperasiannya, di samping itu perusahaan-perusahaan menengah lainnya juga memberikan kontribusinya. Perusahaan-perusahaan besar tersebut adalah PT Pertamina di bidang perminyakan. Retribusi pengujian kendaraan bermotor juga tidak terlepas dari keberadaan 4 perusahaan besar tersebut. Di samping 4 perusahaan besar tersebut, retribusi pengujian kendaraan bermotor juga mendapat kontribusi dari kendaraan bermotor di atas air. Banyaknya kendaraan bermotor di atas air karena Kabupaten Sorong berbatasan langsung dengan laut.

Sehubungan dengan penjelasan kontribusi setiap jenis retribusi daerah terhadap total pendapatan retribusi daerah di atas maka akan berpengaruh juga terhadap total pendapatan asli daerah Kabupaten Sorong. Kontribusi retribusi daerah terhadap total pendapatan asli

daerah adalah kedua setelah pajak daerah, sehingga mempengaruhi terhadap besarnya pendapatan asli daerah secara keseluruhan. Untuk melihat seberapa besar kontribusi retribusi daerah terhadap total pendapatan asli daerah dapat dilihat seberapa besar kontribusi setiap kontribusi setiap jenis retribusi daerah terhadap total pendapatan asli daerah.

Bahwa kontribusi setiap retribusi daerah terhadap total total pendapatan asli daerah pada periode tahun anggaran 2010/2011 sampai dengan 2015 masih rendah hanya berkisar di bawah 8%. Rendahnya kontribusi tersebut untuk jenis retribusi yang telah berjalan lima tahun sebanyak 11 buah. Dari kesebelas jenis retribusi tersebut mulai dari yang tertinggi sampai dengan terendah adalah; retribusi izin gangguan, retribusi izin bangunan, retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan cetak KTP dan KK, retribusi sampah, retribusi pasar, retribusi terminal, retribusi potong hewan dan retribusi kekayaan daerah.

Jenis retribusi dispensasi jalan dan retribusi pengujian kendaraan bermotor pada tahun pertama telah memberikan kontribusi cukup besar terhadap total pendapatan asli daerah dibandingkan dengan jenis retribusi yang telah berjalan sekian lama. Jenis retribusi daerah yang baru terealisasi pada tahun anggaran 2015 tersebut mulai dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil adalah; retribusi dispensasi jalan, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi perikanan dan retribusi lapor tenaga kerja.

Identifikasi jenis pajak daerah dan retribusi daerah

Untuk melakukan identifikasi terhadap pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Sorong digunakan rumus matrik berdasarkan alat analisis overlay. Perhitungan analisis overlay ini menggunakan rata-rata pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah 5 tahun terakhir yaitu dari tahun anggaran 2010/2011 sampai dengan tahun anggaran 2015. Penggunaan perhitungan rata-rata pertumbuhan 5 tahun terakhir tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan data yang dipergunakan dalam analisis overlay. Untuk melakukan perhitungan terhadap rata-rata pertumbuhan 5 tahun terakhir.

Diidentifikasi setiap jenis pajak daerah yaitu pajak daerah yang teridentifikasi sebagai pajak daerah yang prima adalah; pajak hotel dan restoran serta pajak penerangan jalan; pajak daerah yang teridentifikasi sebagai pajak daerah yang berkembang adalah pajak pemanfaatan air bawah tanah; pajak daerah yang teridentifikasi sebagai jenis pajak daerah terbelakang adalah pajak hiburan dan pajak reklame; pajak daerah yang teridentifikasi sebagai pajak daerah potensial tidak dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sorong.

Diidentifikasi setiap jenis retribusi daerah di Kabupaten Sorong yaitu Jenis retribusi daerah yang teridentifikasi prima adalah; retribusi pelayanan kesehatan, retribusi izin

bangunan dan retribusi izin gangguan; Jenis retribusi daerah yang teridentifikasi potensial adalah; retribusi cetak KTP dan KK; Jenis retribusi daerah yang teridentifikasi berkembang adalah; retribusi parkir, retribusi potong hewan dan retribusi trayek; Jenis retribusi daerah yang teridentifikasi terbelakang adalah; retribusi pasar, retribusi sampah, retribusi kekayaan daerah dan retribusi terminal; Empat jenis retribusi daerah yang belum teridentifikasi adalah; retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi dispensasi jalan, retribusi lapor tenaga kerja dan retribusi perikanan disebabkan belum dapat diukur pertumbuhannya karena baru berjalan satu tahun anggaran 2015.

Perhitungan potensi riil retribusi cetak KTP dan KK

Dalam rangka untuk mengetahui perhitungan pajak daerah dan retribusi daerah yang diklasifikasikan potensial berdasarkan analisis overlay digunakan perhitungan berdasarkan peraturan daerah yang ditetapkan. Dari perhitungan analisis overlay dapat diketahui bahwa 6 jenis retribusi daerah dan 15 retribusi daerah yang berada di Kabupaten Sorong yang teridentifikasi sebagai jenis pendapatan asli daerah yang potensial adalah hanya retribusi cetak KTP dan KK.

Berdasarkan hal tersebut untuk mengetahui potensi retribusi cetak KTP dan KK digunakan data sekunder. Data yang diperlukan adalah jumlah kepala keluarga dan penggolongan penduduk menurut usia. Untuk pemilik kartu keluarga adalah kepala keluarga dan pemilik KTP adalah penduduk di atas usia 17 tahun atau sudah kawin.

Dalam perhitungan potensi retribusi cetak KTP dan KK ini tidak diperhitungkan faktor persyaratan dimana KTP diperpanjang setiap 3 tahun sekali, pasangan usia perkawinan di bawah usia 17 tahun dan kartu keluarga dibuat hanya sekali jika ada perubahan dilakukan perbaikan. Dengan perhitungan potensi ini hanya melihat data statistik yang dapat dijadikan acuan dalam menghitung potensi retribusi cetak KTP dan KK.

Perhitungan potensi riil akan dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong nomor 10 tahun 2014, dimana di dalam peraturan daerah tersebut bahwa setiap pelayanan terhadap pembuatan cetak KTP dan KK dipungut biaya untuk pemasukan kas daerah sebesar Rp 3.500. Untuk biaya operasional perhitungan diatur tersendiri dan tidak dibebankan kepada biaya yang disetorkan kepada kas daerah. Berdasarkan pembukuan yang dilakukan oleh pemerintah daerah diketahui jumlah penduduk yang berumur 17 tahun ke atas adalah 100.331, tetapi untuk menghitung potensi riil retribusi KTP dan KK perlu diperhatikan jumlah penduduk yang telah memiliki KTP Sele dan telah memiliki KTP tetapi bukan KTP Sele. Berdasarkan data penduduk yang telah memiliki KTP Sele sebesar 42.574 dan yang telah memiliki KTP tetapi bukan KTP Sele sebesar 12.630. Oleh sebab itu yang belum

memiliki KTP sebesar 45.127. Sehubungan hal tersebut dapat dilakukan perhitungan untuk melihat potensi kartu keluarga adalah; jumlah kepala keluarga x Rp3.500 (berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Sorong nomor 10 tahun 2014) = 28.829 x Rp3.500 = Rp100.901.500; Perhitungan untuk melihat potensi kartu tanda penduduk adalah; jumlah penduduk berusia di atas 17 tahun yang belum memiliki KTP Daerah Sele x Rp3.500 (berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Sorong nomor 10 tahun 2014) = 45.127 x Rp3.500 = Rp157.944.500; Kedua perhitungan tersebut dijumlahkan menjadi Rp100.901.500 + Rp157.944.500 = Rp 258.846.000.

Kesimpulan yang dapat diambil dari kedua perhitungan di atas dapat dikemukakan nilai potensi retribusi cetak KTP dan KK di Kabupaten Sorong pada tahun 2014 adalah sebesar Rp258.846.000; Potensi yang sudah terealisasi diambil dari realisasi tertinggi yaitu pada tahun 2014 dengan nilai sebesar Rp75.508.236 atau sebesar 29,2%, dengan demikian potensi yang belum terealisasi sebesar 71,8%.

Proyeksi pajak daerah dan retribusi daerah

Dalam melakukan perkiraan dimasa yang akan datang diharapkan kesalahan diperkecil seminimal mungkin agar proyeksi yang dilakukan menjadi akurat. Oleh sebab itu perlu dilakukan pengujian terhadap persamaan proyeksi untuk pajak daerah dan retribusi daerah. Pengujian tersebut menggunakan metode *ordinary Least Square* dengan *Software eviews 3.0*. Pengujian ini diharapkan dapat menemukan persamaan yang sesuai dengan kenyataan di lapangan. Persamaan yang akan diuji adalah persamaan linear dan persamaan eksponensial.

Pengujian terhadap persamaan linear yang mempunyai garis lurus untuk melihat apakah cocok digunakan berdasarkan grafik yang dihasil dari titik-titik data yang tidak beraturan tersebut. Demikian pula halnya dengan persamaan eksponensial yang mempunyai garis berbentuk kurva apakah dapat mewakili garis *trend* terhadap grafik yang dihasil dari data sebenarnya. Diharapkan pengujian ini dapat melihat proyeksi pajak daerah dan retribusi daerah dimasa yang akan datang dengan tingkat akurasi yang tepat.

Pengujian persamaan proyeksi pajak daerah.

Persamaan proyeksi pajak daerah yang dihasilkan berdasarkan metode *Ordinary Least Square* dengan *Software eviews 3.0* adalah persamaan linear yang dihasilkan; $Y = 784.000.000 + 137.000.000 X$ dengan uji t signifikan sebesar 4,17 pada *Level of Significant* sebesar 0,05 serta *standar eror* sebesar 32.849.813; persamaan eksponensial yang dihasilkan;

$\ln Y = 19,80992 + 0,189813 X$ dengan uji t signifikan sebesar 10,39 dengan *Level of Significant* sebesar 0,05 serta *standar error* sebesar 0,018252;

Berdasarkan kedua pernyataan di atas yang baik untuk dijadikan persamaan proyeksi pajak daerah adalah persamaan eksponensial. Persamaan tersebut adalah $\ln Y = 19,80992 + 0,189813 X$., maksudnya adalah jika nilai X (nilai tahun proyeksi) tidak ada maka $\ln Y$ (nilai pendapatan proyeksi) meningkat sebesar 19,80992 dan jika nilai X (nilai tahun proyeksi) satu satuan maka $\ln Y$ (nilai pendapatan Proyeksi) meningkat sebesar 0,189813 dengan angka konstanta *ceteris paribus*. Pemilihan dari persamaan eksponensial dapat dilihat uji t signifikan dengan nilai yang lebih besar dari nilai uji t persamaan linear pada *level of Significant* yang sama sebesar 0,05. Untuk *standar error* persamaan eksponensial lebih kecil dari persamaan linear.

Pengujian persamaan proyeksi retribusi daerah.

Persamaan proyeksi retribusi daerah yang dihasilkan berdasarkan metode *Ordinary Least Square* dengan *Software eviews 3.0* adalah persamaan linear yang dihasilkan; $Y = 453.000.000 + 52.851.914 X$ dengan uji t signifikan sebesar 2,5 pada *Level of Significant* sebesar 0,05 serta *standar error* sebesar 21.129.680; persamaan eksponensial yang dihasilkan; $\ln Y = 19,64295 + 0,081971 X$ dengan uji t signifikan sebesar 2,88 dengan *Level of Significant* sebesar 0,05 serta *standar error* sebesar 0,028426;

Berdasarkan kedua pernyataan di atas yang baik untuk dijadikan persamaan proyeksi retribusi daerah adalah persamaan eksponensial. Persamaan tersebut adalah $\ln Y = 19,64295 + 0,081971 X$, maksudnya adalah jika nilai X (nilai tahun proyeksi) tidak ada maka $\ln Y$ (nilai pendapatan proyeksi) meningkat sebesar 19, 64295 dan jika nilai X (nilai tahun proyeksi) satu satuan maka $\ln Y$ (nilai pendapatan Proyeksi) meningkat sebesar 0, 081971 dengan angka konstanta *ceteris paribus*. Pemilihan dari persamaan eksponensial dapat dilihat uji t signifikan dengan nilai yang lebih besar dari nilai uji t persamaan linear pada *Level of Significant* yang sama sebesar 0,05. Untuk *standar error* persamaan eksponensial lebih kecil dari persamaan linear.

Perhitungan proyeksi pajak daerah dan retribusi daerah.

Berdasarkan persamaan yang dihasilkan dari pengujian *Ordinary Least Square* dengan *Software eviews*. pajak daerah pada tahun anggaran 2013 diproyeksikan akan mengalami peningkatan pendapatan dibandingkan pada tahun anggaran 2015 sebesar 11,1%, begitu pula tahun 2014 meningkat sebesar 46,2% dibandingkan tahun anggaran 2013. Hal ini akan memberikan kontribusi yang baik pada peningkatan pendapatan asli daerah; retribusi daerah pada tahun anggaran 2013 diproyeksikan mengalami penurunan sebesar 52,6%

dibandingkan tahun anggaran 2015. Peningkatan terjadi pada tahun anggaran 2014 sebesar 17,8% dibandingkan tahun anggaran 2013 akan tetapi peningkatan tersebut masih di bawah nilai realisasi tahun anggaran 2015.

Proyeksi pendapatan untuk pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun 2013 dan 2014 ini menjadi perhatian bagi pemerintah Kabupaten Sorong. Penurunan pendapatan dari retribusi daerah lebih besar dibandingkan peningkatan pendapatan dari pajak daerah. Hal ini akan mempengaruhi terhadap pendapatan asli daerah secara keseluruhan.

SIMPULAN

Tingkat pertumbuhan dan kontribusi setiap jenis pajak daerah terhadap total penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah di Kabupaten Sorong selalu mengalami fluktuasi selama periode lima tahun pengamatan dari tahun anggaran 2011/2012 sampai dengan tahun anggaran 2015; Tingkat pertumbuhan dan kontribusi setiap retribusi daerah terhadap total penerimaan retribusi daerah dan pendapatan asli daerah di Kabupaten Sorong selalu mengalami fluktuasi selama periode lima tahun pengamatan dari tahun 2011/2012 sampai dengan tahun 2015.

Identifikasi terhadap jenis pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan dengan melihat pertumbuhan dan kontribusinya. Hasil perhitungan pertumbuhan dan kontribusi tersebut dilakukan *shift* dan *share* sehingga menghasilkan klasifikasi; prima, potensial, berkembang dan terbelakang.

Proyeksi pajak daerah mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sedangkan retribusi daerah mengalami penurunan pada tahun 2012 dan meningkat pada tahun 2013.

DAFTAR PUSTAKA

- Insukindro, Mardiasmo, Widayat, W., Jaya, W.K., Purwanto, B.M., Halim, A., Suprianto, J., Purnomo, A.B., 1994, *Peranan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Usaha Peningkatan PAD*, Buku I, KKD FE UGM, Yogyakarta.
- Kaho, J.R, 1997, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Cetakan Keempat, Jakarta.
- Koswara,E, 2000, “Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999: Suatu Telaahan dan Menyangkut Kebijakan, Pelaksanaan dan Kompleksitasnya”, *CSIS XXIX* Nomor 1, Jakarta.

Mardiasmo, Makhfatih, A., Supomo, B., Purwanto, H., 2000, “Pengembangan Model Standar Analisa Belanja (SAB) Anggaran Daerah (APBD)”, *Laporan Akhir*, PAU-SE UGM, Yogyakarta.

Nugroho, Riant D., 2000, *Otonomi ; Desentralisasi Tanpa Revolusi*, Kajian dan Kritik atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia, PT.Elex Media Komputindo, Jakarta.

Syamsi, Ibnu, 1987, *Dasar-dasar Kebijakan Keuangan Negara*, PT. Bina Aksara, Jakarta.